
PERAN DISKURSIF KARYA SASTRA DAN MEDIA

Oleh Nurhadi

Abstract

This article will describe discursive role of literary work and media, as on Foucault terms, in some cases like Dan Brown's novel, Pramoedya Ananta Toer's books, *holocaust* history, and Western media in Edward Said's books.

Literary work or media is have a same discursive role, they are have a role to create a justification that its often involve on power, as a hegemonic aspect or as a counter-hegemonic aspect. Dan Brown's novel, *The Da Vinci Code*, is a form of counter-hegemonic to Cristianity faith. Novels and books of Pramoedya Ananta Toer has sawn as a resitence to Orde Baru goverment in Indonesia. Disobedience to legal version of *holocaust* is an action of criminal in some countries, some one could be punished as a prisoner. Edward Said in some his books, especialy in *Covering Islam*, signed a bias in Western media reporting (especialy USA) about Islam.

Key words: literary, media, discursive.

A. Pendahuluan

Pada tahun 1998, Ignas Kleden dalam Jurnal *Kalam* pernah membicarakan imajinasi dalam sastra dan ilmu sosial. Batas antara fiksi dan fakta bagi Kleden merupakan batas yang tidak mudah untuk ditentukan bagi kedua bidang itu. Secara umum, seperti yang biasa diajarkan dalam pelajaran kesusastraan, perbedaan antara sastra dan nonsastra dirumuskan secara kategoris. Sastra dianggap menyampaikan kenyataan imajiner (*imagined reality*) yang sering disamakan dengan khayalan, sedangkan tulisan ilmu sosial (termasuk tentang media) di pihak lain, menyampaikan kenyataan empiris yang bisa dianggap bisa dites dengan pengamatan indrawi.

Salah satu argumen yang diajukan HB Jassin ketika membela cerpen Kipanjikusmin yang berjudul "Langit Makin Mendung" pada tahun 1969-1970 adalah bahwa karya sastra hanya menyajikan kenyataan artistik dan bukan kenyataan objektif yang bisa diadili menurut hukum positif. Dalam pembelaannya, Jassin menyatakan kalau imajinasi itu berbeda dengan ilmu yang berisi gagasan-gagasan. Imajinasi lebih daripada gagasan, ia adalah keseluruhan kombinasi dari gagasan-gagasan, perasaan-perasaan, kenangan pengalaman, dan intuisi manusia. Imajinasi adalah sesuatu yang hidup, suatu proses, suatu kegiatan jiwa. Dengan demikian, imajinasi yang dituangkan ke dalam suatu karya seni, tidak identik sama dengan kenyataan sejarah, pengalaman atau pun ilmu pengetahuan. Suatu karya seni mempunyai kenyataan artistik yang tidak identik sama dengan kenyataan objektif atau kenyataan sejarah atau kenyataan ilmu pengetahuan (Kleden, 1998:13-15).

Kleden mengomentari uraian Jassin tersebut masih belum memberikan perbedaan yang cukup tegas antara sastra dan ilmu pengetahuan. Kleden mempertanyakan di mana perbedaan konsep utama dari batasan dua bidang itu, yakni kenyataan artistik dalam karya seni dan kenyataan objektif dalam sejarah dan ilmu pengetahuan? Kalangan ilmuwan sendiri sudah amat meragukan apakah mungkin berbicara tentang objektivitas. Bukankah lebih realistis berbicara tentang kontrol terhadap subjektivitas?

Karya-karya seni masa kini yang berbentuk narasi seperti novel, film, sinetron dan sejenisnya sering kali menampilkan suatu pernyataan yang berbunyi, "Kisah dalam cerita ini hanya bersifat fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan peristiwa dengan apa yang terjadi dalam cerita ini hanya bersifat kebetulan, tanpa ada unsur kesengajaan." Pernyataan ini

lebih mempertegas seperti apa yang dikemukakan oleh Jassin dalam membela cerpen yang dimuat dalam majalah *Sastra*, Agustus 1968 di atas. Para pembuat novel, film, sinetron dan sejenisnya sudah memiliki ancang-ancang yang menyatakan bahwa karyanya adalah karya seni, karya imajinatif, yang tidak bisa dipermasalahkan secara hukum positif seandainya ada seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan gara-gara novel, film, atau sinetron tersebut.

Tulisan ini akan mengungkapkan peran diskursif yang diemban baik oleh karya sastra maupun oleh media (salah satu bidang kajian yang berlandaskan pada pemakaian/penggunaan fakta). Sebagaimana dinyatakan oleh Foucault (2002:9) bahwa diskursus (yang diindonesiakan menjadi wacana) yaitu cara menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut, serta saling keterkaitan di antara semua aspek tersebut. Kedua bidang tersebut, yakni sastra dan media, sama-sama memiliki fungsi diskursif, sama-sama menciptakan apa yang oleh Foucault disebut sebagai wahana menciptakan pengetahuan dan kemudian mendapatkan kekuasaan. Sementara kekuasaan tersebut pada gilirannya dipakai untuk mengukuhkan pengetahuan yang dibentuk tersebut.

Pada titik inilah pandangan posmodern mempertanyakan kemapanan pandangan modernisme yang secara biner menyatakan bahwa sastra selalu bersifat fiktif dan media selalu bersifat faktual. Tulisan ini akan melihat peran diskursif tersebut dalam kasus novel Dan Brown, Pramoedya Ananta Toer, sejarah *holocaust*, dan media Barat dalam buku-buku Edward Said.

B. Sastra dan Konteks Sosial Politik

1. Perkembangan Teori Sastra

Perkembangan yang menyatakan bahwa karya sastra hanya berupa karya fiktif atau rekaan imajinatif itu tidak terlepas dari arus pemikiran *grand-narrative* ilmu pengetahuan, termasuk dalam hal ini yaitu perkembangan ilmu sastra itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Abrams (1981:1-8), bahwa pendekatan terhadap karya sastra diawali oleh pendekatan yang berkaitan dengan alam semesta (teori mimetik Plato), kemudian dilanjutkan pendekatan yang bersifat pragmatik (konsep *dulce et utile* dari Horace), lalu pendekatan yang terfokus pada pengarangnya atau ekspresif (zaman Romantik), baru kemudian pendekatan objektif (yang diwakili oleh strukturalisme). Pendekatan-pendekatan terhadap karya sastra yang bersifat objektif inilah yang mendasarkan analisis karya sastra hanya bertumpu pada karya sastra tersebut sebagai satu kesatuan yang otonom, tanpa harus mengaitkannya dengan dunia atau masyarakat yang menjadi representasinya, tanpa harus mengaitkannya dengan pengarangnya ataupun pembacanya.

Pendekatan objektif atau strukturalisme semacam ini diwakili oleh Formalisme Rusia dan *new criticism*. Pendekatan ini menjadi *trend* yang dominan hingga kira-kira pada pertengahan abad ke-20. Dengan demikian, karya seni atau sastra dalam konteks ini, tidak dapat diajukan ke pengadilan mengingat karakteristiknya yang tidak harus dikaitkan dengan latar belakang penulisannya, tidak harus dikaitkan ras, agama atau ideologi pengarangnya ataupun kepada siapa saja pembacanya. Karya sastra merupakan karya imajinatif yang bersifat otonom.

Kalau kita tengok perkembangan sejarah sastra Indonesia pada awal abad ke-20, ada fenomena menarik. Tulisan-tulisan sastra kala itu, terutama dari para penulis keturunan Tionghoa, menambahkan pada awal karyanya berupa kutipan yang berbunyi, "*Tjerita jang betoel soeda kedjadian*" (Suryadinata, 1996:10). Meski menurut Suryadinata kutipan semacam itu hanya sebagai unsur penarik supaya banyak dibaca orang karena terkait dengan peristiwa faktual; dilihat dari sejarahnya, ternyata hal ini menunjukkan suatu pola tersendiri. Jauh di kemudian

hari, pada tahun 2000 dan 2003, Dan Brown menyatakan dalam kedua novelnya: *Angels & Demons* dan *The Da Vinci Code*, “Semua referensi mengenai benda-benda seni, beberapa makam, terowongan, dan arsitektur di Roma adalah betul-betul nyata (tepat sesuai dengan tempatnya) dan dapat disaksikan hingga kini.// Persaudaraan Illuminati juga nyata (Brown, 2005:7)”; “Semua deskripsi karya seni, arsitektur, dokumen, dan ritus rahasia dalam novel ini adalah akurat (Brown, 2004:7).”

2. Perkembangan Teori Sastra pada Paruh Kedua Abad Ke-20

Abrams sebagaimana telah dikemukakan di depan, menyatakan pergeseran orientasi teori dan kritik sastra itu bermula dari mimetik, pragmatik, ekspresif hingga objektif yang mencapai puncak pengaruhnya pada pertengahan abad ke-20. Akan tetapi, pada paruh kedua abad ke-20, pergeseran orientasi pada teori dan kritik sastra tersebut berbalik arah, yakni dari perhatian pada teks sebagai sistem yang otonom menuju pada kaitan antara sastra dengan konteks budaya yang melingkupinya. Pergeseran itu bukan gerakan mundur ke belakang, melainkan sebagai perkembangan akumulatif ilmu sastra yang bertumpu pada pengetahuan yang telah ditemukan sebelumnya (Budianta, 2002:41-44).

Dalam perkembangannya, teori-teori sastra mengikuti dua kecenderungan. Pertama, yang berkecenderungan tekstual yakni teori-teori sastra yang merespon dan mendobrak teori-teori objektif (*new criticism*, formalisme, strukturalisme) tetapi tetap memakai konsep-konsep strukturalisme sebagai kerangka acuannya. Teori-teori yang termasuk dalam kelompok ini adalah dekonstruksi dan teori psikoanalisis Lacan. Kedua, yang berkecenderungan politis/sosiologis yakni teori-teori mutakhir yang menerapkan kajiannya dalam wilayah yang lebih luas, yakni melihat sastra dalam kaitannya dengan berbagai dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Yang termasuk dalam teori-teori ini antara lain neomarksis, teori postkolonial, *new historicism*, dan kajian budaya.

Teori-teori feminis yang berkembang setelah strukturalisme berkembang melalui dua arah, ada yang mengikuti kecenderungan pertama, seperti yang dikembangkan di Prancis oleh Julia Kristeva, Helene Xicous dan lain-lainnya dengan merevisi teori-teori Lacan. Yang mengikuti kecenderungan kedua, yakni menggabungkan permasalahan feminis dengan masalah ras, etnis dan kelas, berkembang lebih subur di Amerika, Inggris, dan Australia. Demikian pula teori-teori wacana seperti yang dikembangkan Foucault kemudian Edward Said, berada di antara dua kutub tersebut. Teori wacana Foucault lebih condong ke yang pertama, sedangkan Edward Said ke yang kedua.

Dalam skema Abrams, pergeseran dari orientasi mimetik ke objektif merupakan periodisasi teori sastra yang berlangsung secara silih berganti dan berlangsung selama beberapa abad. Di pihak lain, teori-teori sastra yang berkembang setelah strukturalisme dalam paruh abad ke-20 merupakan perkembangan yang cepat dan tidak meniadakan satu dengan lainnya. Artinya, hingga awal abad ke-21 berbagai macam teori yang telah disebutkan di atas saling bersaing, mempengaruhi dan meminjam satu sama lain. Yang menjadi trend pada waktu tertentu yaitu yang paling akhir muncul. Dalam konteks saat ini, trend yang mutakhir yaitu *cultural studies*. Dari kecenderungan yang ada, orientasi kritik yang dominan adalah teori yang melihat kaitan sastra dengan konteks (sosial/politik/ekonomi) yang melingkupinya.

Dalam putarannya kembali dari mengkaji teks secara otonom dan mengaitkannya ke konteks yang melingkupinya, teori-teori sastra setelah strukturalisme secara umum memberikan pemaknaan baru tentang apa yang disebut karya sastra, pengarang, pembaca, dan kenyataan atau realitas semesta yang menjadi acuannya. Konsep-konsep tersebut berbeda dengan apa yang

dikemukakan Abrams (Budianta, 2002:41-44). Dari sekian teori yang berkembang, ada teori yang menarik untuk dibicarakan dalam konteks tulisan ini, yakni teori *new historicism*, teori sastra yang memandang sejajar antara karya sastra dan sejarah.

New historicism muncul tahun 1970-an akhir, sebagai bentuk pendekatan alternatif atas interpretasi tekstual yang selama ini didominasi oleh *new criticism*. *New historicism* atau *cultural materialism* di Inggris, menyatakan bahwa semua tulisan sejarah itu bersifat subjektif, ditulis oleh seseorang yang memiliki bias terhadap interpretasi masa lalu. Sejarah, menurut kalangan *new historicism*, tidak akan mampu memberikan kebenaran kepada kita secara total atau memberikan kepada kita gambaran yang akurat mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu atau pandangan dunia suatu kelompok masyarakat tertentu. Dengan mengingkari pandangan *old historicism*, *new historicism* menyatakan bahwa sejarah merupakan salah satu jenis diskursus atau cara pandang atau cara pikir terhadap dunia (Bressler, 1999:238).

Dengan memberi penekanan pada aspek bahwa sejarah merupakan salah satu dari sejumlah diskursus penting lainnya seperti sosiologi dan politik serta secara lebih seksama menguji bagaimana semua diskursus (termasuk analisis yang bersifat tekstual), pengaruh atas interpretasi sebuah teks harus dilihat dari keterkaitannya dengan keseluruhan aktivitas manusia, menerima semua prasangka sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap suatu teks daripada apa yang selama ini dinyatakan oleh *old historicism* atau pendekatan-pendekatan interpretatif lainnya (Bessler, 1999:238).

Dalam pandangan tokoh-tokoh *new historicism* seperti Stephen Greenblatt, Louis Montrose, Jonathan Dollimore dan sejumlah tokoh lainnya; sastra dipandang telah menciptakan dirinya sejajar dengan sejarah. Keduanya, baik sastra maupun sejarah, sama-sama mampu menghadirkan situasi faktual dari masa lalu sebagai sebuah naratif melalui imajinasi kebahasaannya. Kebenaran sejarah maupun sastra adalah kebenaran relatif. Sastra dan sejarah dapat diasosiasikan bergulat dalam satu bidang yang sama, yakni bahasa (Purwanto, 2003:132-133).

C. Peran Diskursif Karya Sastra

1. Kasus pada Novel Dan Brown

Sukses Dan Brown dengan berbagai kontroversinya mengenai sejumlah konterpemahaman Kristiani, lewat novelnya *The Da Vinci Code*, merupakan fenomena yang menarik. Melalui novel ini, konsep-konsep *holy grail*, kemunculan trinitas, kelompok *Priory of Sion*, dan sejumlah hal lain dapat disebarkan ke berbagai penjuru dunia dalam sejumlah versi terjemahannya. Kemapanan versi resmi gereja dipertanyakan oleh novel ini. Bisa saja kritikus atau pembaca pada umumnya menganggap hal ini sebagai fiktif belaka. Lalu bagaimana dengan buku Michael Baigent, Richard Leigh, dan Henry Lincoln, *Holy Blood Holy Grail* (terbit pertama kali 1982) yang ditengarai sebagai sumber penulisan novel *The Da Vinci Code*? Sastra dan juga media sama-sama berfungsi sebagai situs hegemoni, tempat berlangsungnya pertarungan ideologi kekuasaan.

Resepsi terhadap novel ini cukup beragam. Brown sendiri sempat diajukan ke meja hijau oleh Baigent karena dianggap menjiplak bukunya. Akan tetapi, pengadilan Inggris membebaskan Brown dari dakwaan plagiat sehingga filmnya yang kelar dibuat akhirnya dapat juga diputar di seluruh dunia, Mei 2006. Di Yogyakarta, pemutaran perdana film itu diputar di bioskop Ambarukmo Plaza beberapa hari sebelum diterjang gempa bumi (27 Mei 2006). Pemutaran film *The Da Vinci Code* merupakan momen tersendiri bagi perbioskopian di Yogyakarta. Konon, untuk mendapatkan tiket masuk, penonton harus antri panjang. Ini salah satu bentuk resepsi

terhadap versi lain (yakni film) dari buku Brown yang pertama kali terbit di New York, 2003 yang menjadi *best seller* dunia.

Bantahan terhadap novel ini pun cukup beragam. Meski pihak Vatikan tidak melarang terhadap penerbitan buku ini, pihak-pihak yang mewakili Vatikan/Kristen menerbitkan buku-buku yang bersifat menolak, merevisi dan mempertanyakan keabsahan novel yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah seorang manusia, bahkan memiliki keturunan dari perkawinannya dengan Maria Magdalena (sang Cawan Suci atau *holy grail*). Informasi itu dijaga rapat-rapat oleh kelompok *Priory of Sion*, suatu kelompok rahasia tempat Leonardo da Vinci pernah menjadi grand masternya dari 1510—1519 (Brown, 2003:454—455). Faktanya memang demikian. Sebagaimana kelompok rahasia dunia lainnya seperti Freemasonry ataupun Illuminati, kelompok Sion berada dalam wilayah remang-remang, antara fakta dan fiksi. Banyak spekulasi yang menyatakan bahwa kekuasaan *the new world order* (tatanan dunia baru sebagaimana dilambangkan dalam satu dolar Amerika) sekarang berada di tangan kaum kelompok rahasia ini.

Novel *The Da Vinci Code* ini bersifat interogatif. Sebagai teks, novel ini mempertanyakan kemapanan iman dan sejarah Kristiani. Reaksi pembacanya pun beragam. Bahkan novel ini lebih sukses daripada buku Baigent, yang konon menjadi hipogram novel Brown. Terhadap kasus ini, kita pun dapat mempertanyakan apakah penulisan dalam bentuk novel, penuntutan kasus jiplakan, pembuatan versi filmnya, dan sejumlah ulasan yang mengiringinya di media-media massa adalah bentuk reproduksi atas penyangkalan ketuhanan Yesus?

Wajar saja jika pihak Kristiani melakukan konter balik atas ini; karena pertaruhannya adalah keimanan milyaran manusia di belahan bumi ini. Lewat novel ini dinyatakan bahwa, “Dokumen-dokumen di dalamnya (yang dijaga oleh kelompok *Priory of Sion*) dianggap sebagai Dokumen Kaum Murni—ribuan tahun halaman dokumen yang belum diubah dari zaman Pra-Konstantin, ditulis oleh pengikut-pengikut Yesus terdahulu, yang memujanya sebagai guru dan nabi yang seutuhnya manusia (Brown, 2003:356).” Masa pemerintahan Konstantin merupakan tonggak penting dalam sejarah Kristiani. Kalau titik kunci sejarah ini digoyah, cabang sejarah berikutnya akan berbeda. Wajar saja kalau pihak gereja menerbitkan buku-buku bantahan. Hal semacam ini tidak hanya dialami oleh kaum Kristiani tetapi juga oleh umat lain, dan hal itu berlangsung terus-menerus. Kekuasaan menurut Foucault menyebar ke segala arah dan selalu bergerak, tidak ada seorang pun atau satu pihak pun yang dapat menggenggam kekuasaan. Dalam konteks kasus novel Dan Brown ini yaitu mengenai tafsir iman Kristiani.

Pada akhir 2005 banyak kalangan Islam di belahan dunia marah dengan pemuatan karikatur Muhammad di media Denmark dan dimuat ulang sejumlah media Barat lainnya pada awal 2006. Orang-orang yang memprotes pemuatan karikatur itu menganggap pelukis dan media yang menyebarkannya telah menghina nabi, bukan hanya sekedar kebebasan berbicara, ekspresi karya seni dan jurnalistik. Mereka menentangnya karena menganggap karikatur tidak hanya sekedar karya seni yang imajinatif, melainkan juga karya yang bila dibaca khayalak akan menciptakan suatu diskursus yang mendeskreditkan Islam. Di sinilah proses negosiasi hegemoni berlangsung.

Seseorang mungkin akan membaca cerita *Robinson Crusoe* dan *Tarzan* sebagai kisah fiksi imajinatif. Kisah-kisah seseorang yang terdampar di suatu pedalaman nun jauh dari hiruk pikuknya peradaban manusia. Akan tetapi, di mata para pengkaji sastra postkolonial, kedua cerita yang tokoh utamanya berkulit putih itu merupakan representasi dari dominasi orang-orang bule terhadap orang-orang pribumi yang berkulit gelap. Sebagaimana kita ketahui, cerita-cerita semacam itu sama-sama berperan seperti yang disumbangkan oleh kajian yang disebut

orientalisme terhadap proses kolonialisasi. Suatu “kewajiban” yang diemban Barat untuk memberadabkan Timur yang biadab.

Dengan demikian, apakah semua karya sastra memiliki “muatan” politis seperti yang dibicarakan pada bagian atas, dan di pihak lain, media serta juga bidang ilmu sosial yang melandaskan kajiannya pada fakta selalu memiliki bias dalam mencitrakan realitas? Pemaparan terhadap pertanyaan ini bukanlah suatu generalisasi yang bersifat negasi, melainkan suatu alternatif jawaban dalam rangka mencegah terjadinya jawaban secara generalisasi atau malah stereotip, bahwa semua karya sastra bersifat fiktif dan ilmu sosial (termasuk media) bersifat faktual.

2. Kasus pada Buku Pramoedya Ananta Toer

Peran diskursif karya sastra dalam kasus sejarah sastra Indonesia dapat ditinjau dalam karya-karya Pramoedya Ananta Toer, khususnya karya-karya yang lahir di Pulau Buru. Pemerintah Orde Baru melarang buku-buku Pram, yang secara politis dianggap berseberangan dengannya. Tampaknya hanya berupa alasan yang dicari-cari dengan menyatakan bahwa novel-novel Pram mengandung ajaran Marxisme-komunisme dan dapat membahayakan stabilitas keamanan nasional. Apapun yang bakal ditulis oleh Pram, baik novel, biografinya, ataupun kamus bahasa misalnya, pastilah akan dilarang oleh Orde Baru. Lain halnya kalau buku itu misalnya ditulis oleh Idrus atau Mochtar Lubis. Nama Pram dan sejumlah penulis Lekra lainnya, secara historis, telah di-*blacklist* oleh Orde Baru.

Orde di bawah kepemimpinan Soeharto ini menyadari betul, bahwa buku, termasuk karya sastra, dan media merupakan salah satu sarana yang dapat “membahayakan” pemerintahannya. Hanya saja, sering kali Orde Baru melakukan tindakan antisipasi secara represif, melarang buku bahkan menahan penulisnya. Di pihak lain, buku *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk.* (1995) yang dieditori oleh Taufiq Ismail dan DS Moeljanto merupakan salah satu buku yang mengukuhkan legitimasi pemerintahan Orde Baru yang telah melarang paham komunis, melarang lembaga kebudayaannya (Lekra). Buku *Prahara Budaya* yang berisi sejumlah esai yang merekam pertarungan atau polemik Lekra dengan Manifes Kebudayaan pada tahun 1960-an merupakan salah satu bentuk diskursus yang turut menopang keberlangsungan Orde Baru. Buku ini disusun demi kepentingan rezim (Supartono, 2000:7—15; Maier, 2004:440—442). Pemerintahan Soeharto tidak hanya ditopang oleh kekuatan senjata (ABRI), tetapi juga ditopang oleh situs-situs hegemonik dan intelektual organik di belakangnya, seperti buku *Prahara Budaya* ini.

Terbitnya buku *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* (1995) yang lebih berisi data-data faktual merupakan salah satu bentuk resistensi terhadap Orde Baru. Lewat buku ini, pembaca dapat menganalisis bahwa tidak semua tahanan di Pulau Buru terkait dengan PKI. Kemudian dapat dilanjutkan kalau Pulau Buru bukanlah tempat rehabilitasi atau dalam bahasa indahnyalah lembaga pemasyarakatan, melainkan kamp penjara tempat orang-orang diindoktrinasi, dianiaya, dan jika perlu dibunuh secara masal. Dengan demikian, Pulau Buru (yang seringkali ditutup-tutupi eksistensinya dan kebrutalannya) dapat mencitrakan pemerintahan Orde Baru yang penuh dengan kekerasan dan represif (Maier, 2004:452—453). Tidak memerlukan waktu yang lama untuk melarang peredaran buku ini. Kejaksaan Agung mengeluarkan pelarangan terhadap buku ini pada 12 Mei 1995.

Sebelumnya, pada September 1980 pemerintah juga melarang *Bumi Manusia* begitu novel ini diterbitkan. Sekuelnya, *Anak Semua Bangsa* (1981), *Jejak Langkah* (1985), dan *Rumah Kaca* (1988) serta bukunya yang lain *Tempo Doeloe* (1982) dan *Sang Pemula* (1985) juga

mengalami pelarangan. Karya-karya Pram yang tidak terkait dengan dirinya ataupun dengan paham komunisme juga mengalami pelarangan, apalagi dengan buku yang mengupas keberadaan Pulau Buru sebagai kamp penjara. Menyadari hal inilah yang membuat buku *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* terbit dalam edisi bahasa Belanda (*Lied van Een Stomme: Gevangene op Buru*) pada 1989 meski akhirnya juga nekad diterbitkan dalam 1995—1997 (dua edisi, sebenarnya naskah aslinya telah terbit tahun 1988 oleh Lentera).

Catatan-catatan Pram dalam *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* yang dilengkapi dengan sejumlah lampiran (termasuk daftar tahanan Pulau buru yang meninggal berikut asal, pendidikan, dan penyebab kematian/hilang) serta sejumlah foto makin mengukuhkan buku ini bukan sebagai karya fiksi. Meski kalau kita bandingkan, buku Pram ini mirip dengan novel-novel Milan Kundera. Di pihak lain banyak novel-novel Pram dipenuhi dengan data-data historis. Jangankan terhadap karya-karya yang bersifat faktual seperti Catatan, Memoar, Biografi ataupun Diary yang bercerita berdasarkan fakta meski bersifat sepihak dan subjektif; terhadap novel-novel pun Orde Baru melakukan sensor. Pemerintahan Soeharto menyadari betul akan peran diskursif yang diemban baik oleh karya sastra maupun media dalam melanggengkan kekuasaannya, terlepas apakah reaksi yang ditempuhnya melanggar HAM atau tidak.

Orde Baru telah menciptakan suatu pengetahuan (baca: *knowledge*) tentang sejarah G30S/1965, ideologi Pancasila, konsep pembangunan (plus predikat Bapak Pembangunan) dengan sejumlah wacana yang bersifat melegitimasi kekuasaannya (baca: *power*) seperti buku *Prahara Budaya* dan sejumlah buku lainnya, melalui film (seperti: *Janur Kuning*, *Enam Jam di Yogya*, *Pengkhianatan G30S/PKI*), melalui media dan sejumlah sarana lainnya. Selain itu, Orde Baru juga melakukan pelarangan terhadap sejumlah buku, media dan sektor lain yang secara politik berseberangan. Apa yang terjadi pada masa Orde Baru sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Terhadap suatu versi sejarah dunia juga terjadi hal yang serupa, yakni terhadap peristiwa *holocaust* terhadap warga Yahudi dalam Perang Dunia II.

D. Peran Diskursif Media

1. Kasus pada Sejarah *Holocaust*

Kalau pada bagian sebelumnya telah diuraikan tingkat relativitas kefaktualan dan kefiktifan karya sastra, berikut ini akan diuraikan tingkat kebiasaan media dalam memberitakan suatu peristiwa. Bagi Adnan Oktar atau yang terkenal dengan nama penanya Harun Yahya dan juga Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, peristiwa pembantaian kaum Yahudi selama Perang Dunia II di sejumlah kamar gas di wilayah yang dikuasai Jerman, yang lebih dikenal dengan istilah *holocaust*, merupakan sejarah yang penuh dengan kebohongan. Menurut mereka, penulisan sejarah *holocaust* memang direkayasa guna menciptakan suatu tujuan terciptanya negara Israel di wilayah Palestina. Perang Dunia I menghasilkan wilayah Israel, sementara Perang Dunia II menghasilkan para imigran ke wilayah tersebut.

Dalam bukunya, *Holocaust Hoax*, Oktar (2005:93-206) mempertanyakan keabsahan versi resmi sejarah perihal pembantaian dalam kamar gas tersebut. Ada sejumlah fakta yang sengaja disembunyikan dalam peristiwa ini. Ada sejumlah foto yang menggambarkan jumlah korban merupakan hasil rekayasa guna memperbanyak jumlah mayat yang sebenarnya meninggal akibat penyakit tipus. Jumlah korban yang diberitakan dapat dibantai dalam sebuah kamar gas sebanyak 600 orang yang sebenarnya hanya mampu memuat 90 orang, juga merupakan suatu kebohongan. Masih menurut penulis asal Turki ini, pembakaran terhadap jumlah kaum Yahudi yang tewas dalam peristiwa *holocaust* sebanyak 6 juta orang ini memerlukan bahan bakar yang tidak sedikit, padahal Jerman memerlukan bahan bakar untuk armada perangnya.

Ada sejumlah akademisi yang menyangkal peristiwa *holocaust* ini melalui sejumlah risetnya. Meski demikian, penyangkalan terhadap peristiwa ini akan dicap sebagai sikap anti-Semit dan seringkali disejajarkan dengan tindak kriminal serius; meski sebetulnya penyangkalan tersebut bersifat wacana, bersifat diskursif. David Irving, seorang sejarawan Inggris yang mengingkari *holocaust*, diganjar tiga tahun penjara oleh pengadilan Austria ketika dia nekad memberi seminar di negara tersebut. Austria merupakan satu dari dua belas negara di dunia yang menerapkan hukuman bagi para pengingkari *holocaust* sebagai tindak kriminal (Fadjri, 2006:4).

Diskursus tentang *holocaust* ini menghegemoni dunia berkat berbagai pertarungan situs hegemoni yang disebar oleh sejumlah media. Banyak tulisan berupa riset sejarah ditulis guna mengukuhkan versi resmi seperti apa yang dikemukakan dalam sejumlah buku Hannah Arendt. Selain itu, sejumlah karya fiksi juga diciptakan dalam rangka mengukuhkan hal tersebut seperti *Catatan Harian Anne Frank*, film *Schindler's List* garapan Steven Spielberg, dan sejumlah karya lain dalam berbagai lini media. Media sangat berperan penting dalam mengukuhkan suatu diskursus (sebagaimana pengertiannya dalam istilah Foucault). Karya-karya fiksi semacam *Catatan Harian Anne Frank* maupun film *Schindler's List* jika dikaji dalam konteks semacam itu memiliki andil dalam membentuk suatu diskursus tentang *holocaust*, tidak hanya sekedar kajian tekstual sebagaimana dinyatakan oleh kaum strukturalis.

2. Bias Media Barat terhadap Islam dalam Buku Edward Said

Penulisan secara bias tidak hanya dijumpai dalam penulisan sejarah seperti apa yang dinyatakan oleh para *new historicism* yang secara eksplisit menyatakan hal tersebut, tetapi juga dapat dijumpai dalam penulisan di media (massa). Hal ini dinyatakan oleh Edward Said (1935--2003), kritikus sastra dari Universitas Columbia, Amerika Serikat dalam bukunya *Covering Islam*, 1981. Buku ini menurut Said (2002:v) merupakan salah satu kajian serial postkolonial dalam melihat Barat membangun hegemoninya. Buku sebelumnya, *Orientalism* (terbit pertama kali 1978), menjajagi beragam fase hubungan dari invasi Napoleon ke Mesir, melalui periode kolonial utama dan bangkitnya ilmu pengetahuan Orientalis modern di Eropa selama abad ke-19, sampai pupusnya hegemoni imperial Inggris dan Prancis di Timur setelah Perang Dunia II, dan munculnya dominasi Amerika. Tema pokok dalam buku ini yaitu afiliasi pengetahuan dengan kekuasaan, yakni suatu konsep yang berangkat dari apa yang sebelumnya dikemukakan Foucault, dan juga Gramsci.

Buku kedua, *The Question of Palestine* (terbit pertama kali 1979), menyediakan sejarah kasus tentang perjuangan antara orang Arab asli, terutama penduduk muslim di Palestina dan gerakan zionis, yang sumber dan metode untuk memahami realitas-realitas "oriental" Palestina sebagian besar adalah Barat. Kajian Said dalam buku ini secara lebih eksplisit berupaya menggambarkan apa yang telah tersembunyi di bawah permukaan pandangan Barat tentang Timur—dalam kasus tersebut yaitu perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan.

Sementara dalam buku *Covering Islam*, tema pokok yang diangkat Said bersifat kontemporer, yakni respons Barat (terutama Amerika) terhadap dunia Islam yang sejak awal 1970-an dipandang sangat relevan, namun sangat bermasalah dan problematik. Di antara penyebab munculnya persepsi ini yaitu menipisnya persediaan energi yang secara akut dirasakan kepada negara kawasan Teluk Persia produsen minyak yang mengacaukan masyarakat Barat yang mengalami inflasi dan melangitnya harga bahan bakar minyak. Selain itu, revolusi Iran dan krisis sandra di kedutaan Amerika di Teheran telah menyediakan bukti penting tentang apa yang disebutnya "kebangkitan Islam", ditambah sejumlah hal lain yang tidak menguntungkan bagi

Barat. Selain ketiga buku tersebut, sebetulnya masih ada lagi sebuah yang terkait dengan kajian postkolonial ini, yakni *Culture and Imperialism* (terbit pertama kali 1993).

Para ahli atau cendekiawan Amerika seringkali melakukan penggeneralisasian dari waktu ke waktu tentang “seperangkat pemikiran islami” atau “kecenderungan syiah untuk mati syahid” terhadap Islam. Pernyataan semacam itu tidak hanya terbatas pada jurnal-jurnal populer atau media yang mengkhawatirkan pendapat-pendapat tersebut. Hingga buku *Covering Islam* ini diterbitkan (1981), menurut Said (2002:19), sangat jarang terlihat artikel informatif tentang kebudayaan Islam di *New York Review of Books* atau dalam *Harper*. Ketika stabilitas Saudi Arabia atau Iran diragukan, “Islam” tampaknya baru layak dikomentari. Secara garis besar, penulis Kristen kelahiran Palestina ini menyimpulkan, bahwa Islam muncul dalam media Barat hanya sebatas pada sebuah stereotip. Citra Islam sebagai teroris telah muncul dalam kajian buku *Covering Islam* ini, jauh sebelum munculnya tesis Huntington tentang *clash civilisation* atau peristiwa WTC 2001.

Biasanya media Barat terhadap Islam juga terjadi ketika kedua Gedung WTC di New York diruntuhkan oleh masing-masing pesawat yang disiarkan secara langsung (juga oleh sejumlah televisi Indonesia) pada 11 September 2001 pagi hari. Kala itu, stasiun TV CNN menyiarkan betapa gembiranya orang-orang di wilayah Palestina, seolah-olah mereka menyambut ambruknya WTC seperti menyambut kejatuhan musuh. CNN lupa bahwa peristiwa pagi hari di New York sama dengan malam hari di Palestina, jadi tidak mungkin ada latar orang-orang bergembira dengan cuaca langit yang cerah karena matahari. Media kembali menunjukkan tidak hanya sekedar bias seperti apa yang dinyatakan oleh Said, tetapi juga bersifat diskursif seperti apa yang sampaikan oleh Foucault. Dan itu artinya proses kekuasaan.

Dalam sebuah artikelnya yang menarik di *Kompas* (7/3/2006), Oetomo mengomentari krisis nuklir yang kini diajukan oleh Iran, negara yang menjadi fokus pembicaraan Said di atas. Dalam artikelnya, Oetomo menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara militer terbesar sekarang ini, sehingga ia bisa mengklaim sebagai polisi dan pelindung dunia. Kedigdayaannya tidak hanya terletak dalam kekuatan militernya, melainkan juga pada kekuatan citra yang ada di baliknya. Citra itu diciptakan guna meligitimasi klaim Amerika sebagai pelindung dunia yang bisa menjamin rasa penduduk dunia. Karena itu, ia perlu menciptakan keadaan darurat yang permanen melalui isu-isu terorisme dan pengembangan senjata pembunuh massal (biologi dan nuklir) beserta proyek pemberantasannya. Dengan begitu, perlu adanya lembaga militer yang kuat (baca Amerika Serikat) untuk melaksanakan proyek tersebut.

Atas logika itu, menjadi sah jika Amerika mengembangkan senjata nuklir, sarana pelindung dunia. Sebaliknya, jika negara lain (Irak, Korea Utara, Libya, dan kini Iran) mengembangkan nuklir, itu adalah sebuah kejahatan. Ketika segala wacana dan berita tentang ancaman terorisme global mengemuka dan menjadi komoditas berita, perasaan umum akan ketidakamanan menggiring pada bentuk baru konsumsi khalayak dunia, yaitu konsumsi perlindungan.

Lebih lanjut Oetomo menyatakan bahwa untuk menciptakan kebutuhan rasa aman dan stabilitas, diciptakan simulasi aneka ancaman bagi keamanan dan stabilitas dunia. Diciptakanlah satu realitas media (*simulacrum*), seolah-olah dunia benar-benar mendapat ancaman serius dari terorisme yang dilakukan Islam radikal seperti Irak, Palestina, Afganistan, Sudan, Libya, dan Iran beserta jaringannya, terutama dari Osama bin Laden dan kini Ahmadinejad. Semua konstruksi citra itu dibangun melalui strategi komunikasi politik internasional yang hegemonik dan distribusinya disebar dengan rapi oleh jaringan agensi berita besar dunia.

Logikanya, akan tumbuh konsumsi perlindungan di tengah khalayak dunia. Perlindungan pun akan menjadi semacam komoditas. Karena komoditas perlu senjata, perlu militer yang kuat yang jika disalahgunakan bisa berbahaya, hanya Amerikalah yang berhak memproduksi dan menjual komoditas itu. Dalam keadaan darurat permanen itu, diciptakan satu citra melalui berita, film, dokumenter, plus jaringan penyebarannya. Sekali lagi, pernyataan Oetomo makin memperjelas posisi media yang tidak selamanya netral dari berbagai kepentingan. Media bisa saja “berkisah”, sementara di lain pihak, sastra bisa saja “memberitakan realitas”.

E. Penutup

Dari sejumlah uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik media maupun karya sastra sama-sama memiliki peran diskursif, memiliki peran untuk menciptakan suatu pembenaran yang sering kali terlibat dengan kekuasaan, baik sebagai aspek hegemonik maupun sebagai aspek konter-hegemonik. Novel Dan Brown, *The Da Vinci Code*, merupakan salah bentuk konter-hegemoni terhadap keimanan Kristiani. Novel dan buku Pramoedya Ananta Toer dipandang sebagai resistensi terhadap kekuasaan pemerintahan Orde Baru, di Indonesia. Pembangkangan terhadap versi resmi *holocaust* merupakan suatu tindakan kriminal yang di negara-negara tertentu bisa dikenai sanksi hukum. Edward Said dalam sejumlah bukunya, khususnya dalam *Covering Islam*, menengarai adanya bias pemberitaan media Barat (khususnya Amerika Serikat) terhadap Islam.

Seringkali para ahli, khususnya para strukturalis, memberikan batasan yang tegas antara karya sastra dan media. Karya sastra bersifat fiktif sementara media bersifat faktual. Sejalan dengan perkembangan teori sastra pada paruh abad ke-20 yang cenderung melibatkan karya sastra dalam konteks sosialnya seperti yang dilakukan oleh para *cultural studies* ataupun *new historicism*, pandangan yang menyatakan bahwa karya sastra sebagai karya fiktif kini dipertanyakan kembali. Karya sastra memiliki peran diskursif, begitu juga dengan media. Kini tingkat kefaktualan media dipertanyakan kembali, begitu juga tingkat akurasi sejarah. Ada operasi kekuasaan yang bergerak di balik karya-karya sastra, media, juga sejarah. Bukankah kekuasaan dan pengetahuan adalah dua sisi mata uang yang saling melingkupi seperti apa yang dikemukakan Foucault dalam bukunya *Power/Knowledge* (2002a) yang terkenal itu?

Berbicara tentang fakta dan fiksi, pernahkah kita mencermati penerima hadiah nobel bidang sastra pada tahun 1950? Penghargaan itu jatuh pada Sir Bertrand Russel, seorang filsuf besar Inggris. Dia tidak menulis sebuah novel pun atau menerbitkan sebuah kumpulan puisi. Yang dia tulis yaitu tiga jilid *Principia Mathematica* (bersama Whitehead) dan buku epistemologi *Human Knowledge: Its Scope and Limits*. Yang paling dekat dengan kategori tulisan sastra barangkali otobiografinya yang dapat disejajarkan dengan *Confessiones* Santo Agustinus dari abad ke-4. Karya Russel lainnya yang dapat dianggap dekat dengan kesusastraan adalah studinya tentang sejarah filsafat Barat (Kleden, 1998). Lalu, kira-kira parameter apa yang dipergunakan panitia nobel sastra kala itu sehingga mereka menganugerahkannya kepada seorang filsuf, bukan kepada seorang pengarang?

Daftar Pustaka

- Abrams, M.H. 1981. *A Glossary of Literary Terms*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 Bressler, Charles E. 1999. *Literary Criticism, an Introduction to Theory and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.
 Brown, Dan. 2005. *Malaikat dan Iblis* (terj. Isma B. Koesalamwardi). Jakarta: Serambi.
 _____. 2004. *The Da Vinci Code* (terj. Isma B. Koesalamwardi). Jakarta: Serambi.

- Budianta, Melani. 2002. "Teori Sastra Sesudah Strukturalisme," *Bahan Pelatihan Teori dan Kritik Sastra*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Universitas Indonesia.
- Fadjri, Raihul. 2006. "Si Pandir Melawan Holocaust," *Tempo*. Edisi 5 Maret.
- Foucault, Michel. 2002. *Pengetahuan dan Metode, Karya-karya Penting Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra.
- _____. 2002a. *Power/Knowledge, Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Kleden, Ignas. 1998. "Fakta dan Fiksi tentang Fakta dan Fiksi," *Kalam*. Edisi 11.
- Maier, Henk. 2004. "The Note of a Lonely Man Pramoedya Ananta Toer in the World of Human Beings," dalam *We Are Playing Relatives: A Survey of Malay Writing*. Lieden: KITLV Press.
- Oktar, Adnan. 2005. "Holocaust Hoax," www.harunyahya.com. Diakses 14 April.
- Oetomo, Mochtar W. 2006. "Nuklir, Terorisme, dan Pelindung Dunia," *Kompas*. Edisi 7 Maret.
- Purwanto, Bambang, 2003. "Historisisme Baru dan Penulisan Sejarah," dalam *Sastra Interdisipliner* (ed. Muh. Arif). Yogyakarta: Qalam.
- Said, Edward W. 2002. *Covering Islam, Bias Liputan Barat atas Dunia Islam* (terj. A. Asnawi dan Supriyanto Abdullah). Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Suparsono, Alexander. 2000. "Lekra vs Manikebu: Mitos Pemenggal Sejarah," *Skripsi*. Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.
- Suryadinata, Leo (ed.). 1996. *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2000. *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu: Catatan-catatan dari P. Buru*. Jakarta: Hasta Mitra.

Artikel no 44 dimuat di Jurnal Diksi FBS UNY edisi Januari 2006;
kode: peran diskursif
